



Pemkot Targetkan Seluruh Badan Publik Berkategori Informatif

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya menjamin keterbukaan informasi publik mampu dijalankan oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini seiring kedudukan OPD sebagai badan publik yang seluruhnya ditargetkan masuk dalam kategori informatif.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) Kota Yogya Ignatius Trihastono, mengungkapkan keterbukaan informasi publik menjadi tanggung jawab seluruh OPD di lingkungan Pemkot Yogya. "Kami sudah berkomitmen untuk menjalankan standar pelayanan informasi sesuai regulasi yang berlaku. Sehingga evaluasi juga terus kami lakukan dengan melibatkan para kepala OPD," tandasnya, Rabu (16/7).

Dirinya juga menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah berkomitmen penuh untuk mewujudkan badan publik yang informatif. Bahkan dalam audiensi dengan

Komisi Informasi Daerah (KID) DIY beberapa pekan sebelumnya, seluruh badan publik baik OPD, kemandren maupun BUMD memiliki target 100 persen masuk kategori informatif. Komitmen tersebut diperkuat melalui terbitnya Surat Edaran (SE) Walikota Yogya Nomor 100.3.4/1768 tentang Perintah Untuk Mengupayakan Peningkatan Kualifikasi Menjadi Informatif Dalam Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2025.

Trihastono menambahkan pada tahun sebelumnya dari 53 badan publik di lingkungan Pemkot Yogya yang dinilai oleh KID DIY terdapat 20 badan publik berhasil masuk dalam kategori informatif. Hasil

tersebut merupakan yang tertinggi di DIY. Selain itu, 27 badan publik lainnya masuk kategori menuju informatif. "Target kita bukan sekadar meningkatkan dari 'kurang informatif' ke 'informatif' tapi semua badan publik dari posisi manapun harus bisa naik kelas menjadi informatif. Ini menjadi tanggung jawab bersama," imbuhnya.

Oleh karena itu dirinya berharap setiap perangkat daerah dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik secara konsisten dan terukur. Hal ini guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kepada masyarakat.

Ketua KID DIY Erniati, sebelumnya menjelaskan pihaknya ingin mengukur sejauh mana keterbukaan informasi publik telah sesuai dengan regulasi. Jika belum maksimal jajarannya juga akan menyampaikan berbagai rekomendasi sebagai mengukur tingkat kepatuhan badan publik sekaligus menjadi

dasar untuk perbaikan ke depan.

Erniati juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh OPD, kemandren, dan BUMD dalam mengoptimalkan layanan informasi. "Terlebih tren saat ini menunjukkan masyarakat akan langsung menyampaikan keluhan ke media sosial jika layanan informasi publik tidak maksimal. Badan publik sering kali tidak menyadarinya, maka upaya yang dilakukan harus maksimal agar berdampak pada masyarakat," ujarnya.

Pihaknya juga menjelaskan, penilaian juga dilakukan berdasarkan enam indikator utama, yaitu, komitmen organisasi, sarana dan prasarana, digitalisasi, jenis informasi, kualitas informasi, dan pelayanan informasi. Dirinya berharap, keterbukaan informasi publik sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Sehingga mampu meningkatkan ukuran kepatuhan badan publik di lingkungan Pemkot Yogya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005